

ABSTRAK

Dini Lutfiah Berlian, 2015: *Sistem Penyaluran Dana PNPM Mandiri Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.*

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang didunia ini. Program PNPM Mandiri yang ada di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merupakan Program dari pemerintah sejak tahun 2008 dan semenjak tahun 2015 PNPM Mandiri *Phase Out*. Berbeda dengan PNPM Mandiri yang ada di Desa-desa lainnya PNPM Mandiri di Desa maron kidul adalah salah satu yang masih menjalankan kegiatannya walaupun tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Apa saja program PNPM Mandiri upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo ?; 2) Bagaimana mekanisme penyaluran dana PNPM Mandiri upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?: 3) Apa saja kendala penyaluran dana yang di hadapi PNPM Upaya pemberdayan ekonomi Masyarakat di desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten probolinggo?; 4) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghadapi Kendala penyaluran dana PNPM Mandiri upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten probolinggo?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja program PNPM, Untuk mendeskripsikan mekanisme penyaluran dana PNPM Mandiri, Untuk mendeskripsikan kendala penyaluran dana PNPM Mandiri, Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala penyaluran dana PNPM Mandiri.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, menganalisis sistem penyaluran dana di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan tehnik *purposive sampling* dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: (1) program PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo hanya Simpan Pinjam Perempuan (2) sistem Penyaluran dana PNPM Mandiri yang ada di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merupakan dana dari rekening kolektif di UPK ke Desa melalui Tim Pengelola Kegiatan dengan mengajukan Proposal (3) kendala penyaluran dana PNPM mandiri perdesaan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu lebih kepolafikir masyarakat dan tidak adanya jaminan sehingga pihak UPK-PNPM merasa kesulitan dalam menangani hal tersebut (4) upaya menangani kendala penyaluran dana PNPM untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu perpanjangan waktu kredit dan perpanjangan waktu angsuran dengan menagih terus menerus melalui telepon ataupun mendatangi langsung kerumahnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan dihuni kurang lebih 241 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak Indonesia memiliki segudang persoalan yang menjadi perhatian pemerintah. Dari segudang persoalan tersebut diantaranya mengenai kemiskinan yang hingga saat ini pemerintah belum bisa mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan di dapat dilihat dari 3 aspek yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural dan kesenjangan antar wilayah. Pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya dalam menanggulangi harus menggunakan pendekatan multi dimensi pemberdayaan dengan kemudian dipadukan dengan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang didunia ini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun negara di jagat raya ini yang “kebal” dari kemiskinan. Semua negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan. Semua umat manusia di planet ini setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa ditanggulangi.¹

¹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 2009),14.

Kemiskinan memiliki banyak definisi. Sebagian orang memahami istilah kemiskinan dari perspektif subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Meskipun sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan sejatinya menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural, institusional, dan struktural. Kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan adanya kebutuhan sosial.

- a. Kekurangan materi, kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar.
- b. Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” disini sering dikaitkan dengan standart atau garis kemiskinan (*Proverty Line*) yang berbeda-beda dari satu Negara ke Negara lainnya, bahkan dari satu komunitas ke komunitas lainnya dalam satu negara.
- c. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial (*social ekslusion*), ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial, seperti lembaga pendidikan, kesehatan dan informasi.²

² Ibid.,15.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi dari semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai pudar. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberantasan kemiskinan terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Insan Ayat 8 yang berbunyi:

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.³

Penyebab kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

- a) penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.
- b) penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.

³Departemen Agama RI, *ALHIDAYAH Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: KALIM,),580.

- c) penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.
- d) penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.
- e) penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Di Indonesia ini masih banyak rakyat miskin atau kurang mampu, ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh banyaknya anak putus sekolah, faktor lingkungan yang kurang mendukung yang berakibat minimnya penghasilan, maka pemerintah mengambil langkah ataupun kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat bisa hidup makmur.

Menurut Ali Yafie Terdapat petunjuk dari salah satu hadist yang mengungkapkan sebab-sebab kemiskinan yang berbunyi:

“...aku mohon supaya Engkau (Tuhan) melindungi aku dari kelemahan (*al-ajz*), kemalasan, ketakutan, kepelitan, terlilit hutang dan diperas atau dikuasai sesama manusia.”

Didalamnya tercantum hal-hal pokok yang menimbulkan kemiskinan yang memelaratkan, yaitu:

Pertama: Kelemahan. Apakah itu kelemahan hati dan semangat, atau kelemahan akal dan ilmu, ataukah kelemahan fisik. Semua itu mengurangi

daya pilih dan daya upaya manusia sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pencipta dan pembangun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua: Kemalasan. Tidak diragukan lagi bahwa sifat ini merupakan pangkal utama dari kemiskinan. Penataan hidup sehari-hari yang diajarkan oleh islam sangat bertolak dengan sifat ini.

Ketiga: Ketakutan. Hal inipun jelas merupakan penghambat utama untuk mencapai suatu sukses dalam pekerjaan dan usaha. Keberhasilan seorang dalam merintis ataupun melanjutkan sesuatu atau tugas banyak tergantung dari keberanian yang ada pada dirinya.

Keempat: Kepelitan. Hal ini banyak bersangkutan dengan pihak si kaya, karena dengan sifat ini tanpa disadari kepelitannya itu membantu untuk tidak mengurangi kemiskinan, dan menepatkan dirinya menjadi sasaran untuk dibenci oleh si miskin.

Kelima: Terlilit hutang. Terdapat bnyak peringatan dari ajaran islam untuk berhati-hati jangan sampai terjerat hutang-hutang, karena hutang itu adalah sangat membelenggu kebebasan, baik di dunia maupun diakhirat. Apalagi orang yang sudah terbiasa dengan membiayai hidupnya dari hutang-hutang sulit sekali mengangkat dirinya dari lumpur kemiskinan.

Keenam: Di peras atau dikuasai sesama manusia.hal ini merupakan penyebab bagi timbulnya banyak penderitaan dan kemelaratan, baik pada tingkat perorangan maupun pada tingkat masyarakat, bangsa dan negara.

Pemerasan manusia kuat menimbulkan sistem perbudakan, dan pemerasan manusia kaya menimbulkan sistem riba.⁴

Di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sebagai bagian dari wilayah Indonesia masih banyak masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin atau kurang mampu, dalam hal ini pemerintah berkewajiban menangani persoalan kemiskinan yang ada di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui program yang dicanangkan pemerintah pusat yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sejak tahun 2008. Pada umumnya masyarakat Maron Kidul berpenghasilan rendah dan pendidikan rendah sehingga banyak masyarakat yang ada di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo masih memiliki tingkat ekonomi rendah. Dan pemerintah desa turun langsung menangani persoalan tersebut agar masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan yang layak.

Program PNPM Mandiri yang ada di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merupakan Program dari pemerintah sejak tahun 2008 dan semenjak tahun 2015 PNPM Mandiri tidak lagi mendapatkan bantuan dana dari pemerintah (*phase out*). Namun, Berbeda dengan PNPM Mandiri yang ada di Desa-desa lainnya PNPM Mandiri di Desa Maron Kidul adalah salah satu yang masih menjalankan programnya walaupun tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah.

⁴ Wildana Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 15-17.

Uraian latar belakang diatas, dianggap representatif untuk dijadikan alasan bahwa penelitian mengenai strategi pengentasan kemiskinan dan penyaluran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo penting untuk di kaji dan di teliti dengan Judul: *“Penyaluran Dana PNPM Mandiri Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo”*

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua faktor permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Adapun masalah-masalah difokuskan sebagai berikut:⁵

1. Apa saja program PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana PNPM Mandiri dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?
3. Apa saja kendala penyaluran dana yang di hadapi PNPM Mandiri dalam Upaya pemberdayan ekonomi Masyarakat di desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten probolinggo?

⁵ Tim Penyusun STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press: 2014), 44-45.

4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghadapi Kendala penyaluran dana PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁶

Tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan program PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme penyaluran dana PNPM Mandiri dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
3. Untuk mendeskripsikan kendala penyaluran dana PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
4. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala penyaluran dana PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

⁶ Ibid. , 45

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.⁷

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai upaya kontribusi pemikiran melalui karya ilmiah terhadap masalah-masalah mengenai strategi dan sistem penyaluran dana Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) Mandiri.

2. Secara Praktis

1) Sebagai bahan untuk menambah khazanah bacaan bagi lembaga Institut Agama Islam (IAIN) Jember khususnya dan Perguruan Tinggi Islam lain umumnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dalam rangka menciptakan dan mengembangkan intelektual masyarakat kampus.

2) Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia tergantung masyarakat yang ingin menerapkannya atau bisa mengatasi problem-problem pemberdayaan ekonomi masyarakat.

⁷ Ibid , 45.

- 3) Bagi penulis, proses penulisan, pengkajian dan laporan dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan ataupun pertimbangan untuk meningkatkan loyalitas penulis. Kepada lembaga dan individu demi menyadarkan akan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan memberikan masukan kepada masyarakat setempat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁸

1. Sistem

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁹

Sistem menurut purwadarminto adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja secara bersama agar dapat melakukan suatu maksud.¹⁰

2. Penyaluran dana

Penyaluran dana adalah proses turunnya dana dari pemerintah kepada masyarakat.

Penyaluran dana terdiri dari jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan infestasi khusus, maka penyaluran dana secara garis besar

⁸ Ibid , 45.

⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 1320.

¹⁰ <http://informasi.com/pengertian-sistem-menurut-para-ahli/> tanggal akses 2 juli 2015

adalah produk pembiayaan syariah yang terbagai ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan.¹¹

3. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.¹²

4. Ekonomi masyarakat

Ekonomi masyarakat adalah ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal sangat penting dalam memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penulisan skripsi yang nantinya akan dapat memberikan pemahaman sekilas bagi penulis dan pembaca karya tulis ini. Untuk lebih memudahkan dalam pembuatan skripsi, maka sebaiknya disusun suatu sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan yang ada dalam skripsi.

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat tentang semua hal yang berkaitan dalam pembahasan skripsi, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan diskripsi dan ilustrasi* (Yogyakarta:Ekonesia,2003),46.

¹² Zubaedi, *Pengembangan masyarakat wacana dan praktik* (Jakarta: Kencana,2013),24.

¹³ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 355.

BAB I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu: Latar belakang sebagai bahan pertimbangan awal mengetahui dan mengkaji lebih jauh dari permasalahan yang ada, sebagai kelanjutannya adalah fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, selanjutnya gambaran teknis dalam penelitian diklasifikasikan kedalam sistematika pembahasan.

BAB II kajian kepustakaan, yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III dalam bab ini akan dikemukakan mengenai metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV ini membahas tentang penyajian data dan analisis yang didalamnya mencakup gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

BAB V penutup, kesimpulan dan saran, sebagai sub bab terkait dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.¹⁴

1. Penelitian Qurratu Ainil Anis tahun 2011 dengan judul “*Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember)*”.

Rumusan masalah yang menjadi pokok kajian penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimanakah strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Gumelar, kecamatan Balung, Kabupaten Jember?; 2) Apa saja jenis program pemberdayaan ekonomi masyarakat di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember?. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif, dan penentuan informannya menggunakan purposive sampling, metode pengumpulan data meliputi metode interview, observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisa datanya adalah deskriptif

¹⁴ STAIN, *Pedoman penulisan*, 46.

kualitatif yang meliputi: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan datanya menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

Penelitian tersebut lebih menekankan kepada strategi PNPM untuk pemberdayaan di desa Gumelar. Sedangkan penelitian yang akan di kaji dalam penelitian ini lebih kepada strategi pemberdayaan dan penyaluran dana PNPM di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama sama melakukan penelitian di PNPM.¹⁵

2. Penelitian Anisatul Wahidah tahun 2010 dengan judul “*Persepsi tokoh Masyarakat Islam Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (Studi Kasus tahun 2009 di desa Kaligung, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi)*”.

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan metode pengumpulan datanya meliputi: metode observasi, interview dan dokumentasi, penentuan informan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Adapun anlisa datanya menggunakan deskriptif.

Dari hasil penelitian tesebut disimpulkan bahwa PNPM Mandiri adalah salah satu program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat. Konsep PNPM Mandiri Perdesaan di pandang baik bahkan

¹⁵ Qurratu Ainil Anis, *Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember* (Skripsi: Jember,2011)

sangat baik oleh tokoh masyarakat Islam Kaligung, begitu juga pelaksanaan terhadap konsepnya, meskipun ada sedikit pandangan negatif (kurang baik) terhadap pelaksanaan konsepnya. Tetapi banyak tokoh masyarakat Islam di desa Kaligung yang memandang baik. Oleh karena itu penunjang keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat Islam di desa Kaligung dapat mempermudah menjalankan program-program pemerintah agar dapat diketahui baik dan tidaknya suatu program.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama meneliti tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu lebih mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) namun pada penelitian ini lebih mengkaji mengenai strategi dan penyaluran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.¹⁶

B. Kajian Teori

1. Program PNPM Mandiri Upaya Memberdayakan Ekonomi masyarakat

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan agenda program atau kebijakan yang diprioritaskan oleh pemerintah sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. PNPM Mandiri dapat didefinisikan sebagai “upaya

¹⁶ Anisatul Wahidah, *Persepsi Tokoh Masyarakat Islam Terhadap program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Studi Kasus Tahun 2009 di Desa Kaligung Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi* (Skripsi: Jember, 2010)

pemerintah untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, baik individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan, kesejahteraan dan kualitas hidup”¹⁷.

Lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas atau kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi:

a. Prasarana dan Sarana

Prasarana dan sarana di Indonesia dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuka akses informasi dan pemasaran terutama di daerah tertinggal atau terpencil. Meskipun demikian eksistensi program bukan hanya sebatas membangun program fisik, namun lebih dimaksudkan menyiapkan tatanan sosial masyarakat yang lebih baik sekaligus memberdayakannya agar mampu mengakses manfaat program fisik secara optimal bagi perbaikan pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

¹⁷ Wisnu Indrajit dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan* (Malang: Intrans Publishing, 2014), 14.

1. Tujuan pembangunan prasarana dan sarana adalah pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa, serta peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

2. Jenis kegiatan prasarana dan sarana yang dapat didanai oleh PNPM

Mandiri Perdesaan:

- a) Jalan,
- b) Jembatan,
- c) Pasar, Tempat Pelelangan Ikan,
- d) Air bersih,
- e) MCK (Mandi, Cuci dan kakus),
- f) Tambatan perahu,
- g) Rakit Penyeberangan,
- h) Listrik, pompa air, dll.

b. Bidang pelayanan pendidikan

Bidang pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokratis pada musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Sejalan dengan prinsip *open menu* semua jenis kegiatan pendidikan formal dan non formal (termasuk pelatihan keterampilan masyarakat) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin.

1) Tujuan bidang pelayanan kesehatan mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kapasitas rumah tangga miskin perdesaan sebagai bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.

2) Jenis kegiatan

a) Beasiswa

Bantuan beasiswa diperuntukkan bagi murid atau siswa belajar atau anak dari rumah tangga miskin dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan wajib belajar 9 tahun.

b) Pelatihan keterampilan masyarakat

Bantuan pelatihan keterampilan masyarakat dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga miskin sesuai dengan potensi, bakat dan minat yang dimilikinya sehingga menciptakan daya saing dan peluang tenaga kerja antara lain: kursus menjahit, bengkel otomotif, sablon, buta aksara dan lain-lain.

c) Pengembangan wawasan dan kepedulian

Maningkatkan pemahaman bagi rumah tangga miskin tentang pentingnya pendidikan baik formal maupun non formal. Bentuk bantuan kegiatan dapat berupa kampanye pendidikan, pertemuan komite sekolah dan lokakarya desa dengan tema-tema seperti: gender, lingkungan, hak anak, bahaya penggunaan obat-obat

terlarang, bahaya pestisida dari pupuk kimia, hak-hak sipil masyarakat, antisipasi konflik, pendidikan dan kesehatan.

c. Bidang layanan kesehatan

Sejalan dengan kegiatan pemerintah melalui program Menuju Indonesia Sehat 2010 yang mempunyai tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, PNPM Mandiri perdesaan mengembangkan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat melalui penyadaran dan perubahan perilaku, penyediaan bantuan bidang layanan kesehatan masyarakat khususnya sasaran rumah tangga miskin. Kegiatan bidang layanan kesehatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membantu mengatasi permasalahan kesehatan bagi rumah tangga miskin, seperti: dengan adanya perubahan perilaku tidak sehat menjadi perilaku hidup bersih dan sehat, perbaikan gizi, meningkatnya akses layanan kesehatan melalui pembangunan polindes dan posyandu, penyediaan obat dan peningkatan kapasitas kader kesehatan masyarakat, serta penciptaan lingkungan hidup yang sehat melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan (sanitasi dan air bersih), adanya dana tabungan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Dengan kegiatan layanan bidang kesehatan diharapkan pening mandiri oleh masyarakat. Dengan kegiatan layanan bidang kesehatan diharapkan peningkatan kualitas

sumber daya manusia sehingga mempercepat pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs).

1) Jenis kegiatan

- a) Penyuluhan kesehatan
- b) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
- c) Peningkatan keehatan lingkungan

d. Simpan Pinjam Khusus Perempuan

Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dalam kegiatan simpan pinjam sasaran program adalah peningkatan kapasitas anggota kelompok yang tergolong Rumah Tangga Miskin dalam menjalankan usaha sehingga dengan mengikuti pelatihan diharapkan usahanya dapat berkembang dan memberikan peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin.¹⁸ Adapun Tujuan dan Ketentuan SPP:

1) Tujuan umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan social dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum

¹⁸ Direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, *penjelasan IV petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan*.52.

perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan pencipta lapangan kerja.

2) Tujuan Khusus

- a) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun social dasar.
- b) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanan modal usaha.
- c) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan

3) Ketentuan dasar SPP

- a) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- b) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- c) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- d) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga

meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

- e) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.¹⁹

2. Mekanisme Penyaluran Dana PNPM

Penyaluran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri disediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana prasarana penunjang produktifitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran.²⁰

Masyarakat desa terutama dari Rumah Tangga Miskin merupakan sasaran dari PNPM Mandiri Perdesaan sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian.²¹

Penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah aliran dana PNPM Mandiri Perdesaan dari rekening kolektif di UPK ke desa melalui

¹⁹ Direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, *penjelasan IV petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan*.⁵⁷

²⁰ http://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan tanggal akses 21 April 2015

²¹ Direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, *penjelasan V petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan*. 1.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan rencana kegiatan dan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu.

Penyaluran dana dalam ilmu ekonomi juga disebut distribusi yaitu penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat seperti pasar, toko dan lain-lain.²² Dalam agama Islam telah dijelaskan dalam Surat Al-Hadid.

ط
 ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ
 فَالَّذِيْنَ ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.²³

Konsep islam menjamin sebuah distribusi yang memuat nilai-nilai insani, yang diantaranya dengan menganjurkan untuk membagikan harta lewat sadakah, infaq, zakat dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Akibat ketidakadilan sistem distribusi menimbulkan penyakit sosial seperti ketidakharmonisan hiddup manusia, kurang bergeraknya potensi ekonomi serta timbulnya masalah kriminal. Bahwasannya dalam distribusi harus ada keadilan agar tercipta keseimbangan dalam perekonomian.²⁴

²² Mahmudah, *ayat-ayat ekonomi* (Jember: STAIN Jember press, 2013), 50.

²³ Agama RI, *ALHIDAYAH Al-Qur'an Tafsir*, 539.

²⁴ Mahmudah, *ayat-ayat ekonomi*, 50-51.

a. Sosialisasi Penyaluran Dana PNPM Mandiri Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Strategi yang dikembangkan PNPM mandiri pedesaan dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM mandiri pedesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran menguatkan sistem partisipatif serta menguatkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi dan strategi yang dikembangkan maka PNPM mandiri lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Adapun pendekatan-pendekatan pemberdayaan masyarakat:

1) Pendekatan Komunitas (*the community Approach*)

Pengembangan masyarakat memfokuskan pada partisipasi masyarakat (komunitas) disamping memperhatikan aspek lokalitas. Dalam pendekatan ini, komunitas diartikan sebagai kumpulan individu (bisa juga dalam bentuk kelompok) yang masih memiliki tingkat kepedulian dan interaksi antar anggota masyarakat yang menempati suatu wilayah yang relatif kecil (lokalitas) dengan batas-batas yang tempat.

2) Pendekatan kemandirian informasi

Dalam pengembangan masyarakat dengan pendekatan kemandirian informasi, beragam informasi dimanfaatkan oleh partisipan yang berpengetahuan dalam kehidupan komunitas sehingga dapat menciptakan perbedaan arahan dan kualitas hidup.

Pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang baik dari warga komunitas tentang proses-proses dan isu-isu pengembangan masyarakat.

Terdapat beberapa tahap yang dilakukan dengan pendekatan kemandirian informasi dalam proses pengembangan masyarakat. Tahap pertama dalam dimulai dengan pencarian karakter. Tahap berikutnya, pertanyaan-pertanyaan yang difokuskan dalam spekulasi dan cara yang bebas haruslah diseleksi dalam frase dan maksud yang dituju oleh sejumlah orang yang terlibat tanpa menyudutkan masalah tersebut ke posisi yang sulit.

3) Pendekatan pemecahan masalah (*The Problem-Solving Approach*)

Pendekatan pemecahan masalah dilakukan oleh komunitas dengan menggunakan jasa tenaga ahli untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh para warga. Pendekatan ini adalah pemanfaatan pengalaman komunitas lain yang diketahui proses dan hasil dicapainya untuk diterapkan pada komunitas sendiri, dengan harapan mendapatkan hasil yang sama. Tenaga ahli tersebut melakukan identifikasi masalah dan pemecahannya, mencarikan bagi komunitas sumberdaya untuk memecahkannya, merencanakan tindakan-tindakan untuk itu, mengadakan aktivitas yaitu memobilisasi partisipasi warga, dan akhirnya ia mungkin mengevaluasi seluruh proses dan hasilnya.

4) Pendekatan Demonstrasi (*The Demonstration Approach*)

Pendekatan demonstrasi mencakup pemaparan metode atau hasil yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa prosedur kerja tertentu akan mungkin mencapai keberhasilan. Pendekatan ini juga mencakup masalah penerapan metode dan hasil pengembangan dalam suatu komunitas ke komunitas lain. Paling penting dari aplikasi pendekatan ini adalah dalam adaptasi model ketujuan warga komunitas.

5) Pendekatan Eksperimen (*The Experimental Approach*)

Pendekatan eksperimen adalah penerapan pengalaman komunitas lain yang tidak diketahui bagaimana hasilnya, dalam komunitas sendiri dengan harapan dapat melihat bagaimana hasilnya. Pendekatan ini didesain secara metodologis sesuai dengan pendekatan-pendekatan lain untuk pengembangan komunitas.

6) Pendekatan Konflik-Kekuatan (*The Power-Conflict Approach*)

Pendekatan konflik kekuatan adalah upaya memperbaiki komunitas dengan gagasan-gagasan yang masing-masing didukung oleh kekuatan yang bersumber dari kekuasaan, kecerdasan, kekayaan dan lain-lain. (tetapi bukan kekerasan) dari kelompok-kelompok warga komunitas.²⁵

²⁵ Fredian Tony Nasdian, *Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 62-84.

Secara sederhana dikenal adanya tiga pendekatan pemberdayaan yaitu pendekatan yang bersifat mikro, mezzo dan pendekatan yang bersifat makro.

1) Pendekatan Mikro

Dengan pendekatan mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien (penerima manfaat) secara individual melalui bimbingan, konseling, pengelolaan stress dan intervensi krisis. Tujuan pemberdayaan dengan pendekatan mikro adalah untuk membimbing dan melatih penerima manfaat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai model pemberdayaan yang berpusat pada model.

2) Pendekatan Mezzo

Dengan pendekatan mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap dan melalui kelompok klien (penerima manfaat) sebagai media intervensi pendidikan dan pelatihan. Pendekatan ini pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, melatih keberanian dan kemauan untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi bersama-sama.

3) Pendekatan Makro

Dengan pendekatan makro, kelompok penerima manfaat (*klien*) diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih

luas. Pendekatan ini memandang *klien* sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memahami situasi mereka sendiri, mampu menetapkan dan memilih berbagai alternatif yang tepat untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi.²⁶

b. Prosedur penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

- a) Sebelum penyaluran dana ke desa dilakukan, maka dibuat surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dan TPK yang diketahui oleh camat dan tiap-tiap kepala desa. SPPB memuat jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan melampirkan dokumen dokumen.
- b) Dokumen pengajuan tersebut diperiksa kelengkapan dan keabsahannya oleh UPK dan fasilitator kecamatan. Kemudian UPK menyiapkan slip penarikan dari rekening kolektif dan kwitansi-2 (KW-2).
- c) Penyaluran dana dari UPK ke TPK harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan desa, kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan desa selanjutnya dituangkan dalam Rencana Penggunaan Desa (RPD) yang disiapkan oleh kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMDD) dan TPK tiap-tiap desa untuk selanjutnya diverifikasi oleh UPK dan fasilitator kecamatan di kecamatan.

²⁶ Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan* (Bandung: Fokus Media, 2014), 98-99.

- d) Setiap pengajuan penyaluran dana, TPK harus menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) dari RPD sebelumnya disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawabannya.
- e) Sebelum penyaluran dana terakhir, TPK dan KPMD membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh TPK dan KPMD.
- f) Setelah kegiatan selesai 100 persen dan sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST), terlebih dahulu harus dilakukan sertifikasi oleh fasilitator kecamatan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- g) Sebelum dilakukan MDST, dokumen-dokumen pencairan dan penggunaan dana harus sudah lengkap, diisi dengan benar sesuai dengan fakta penggunaannya.²⁷

c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *“people-centered”*, *participatory*, *empowering*, and

²⁷ Direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, *penjelasan IX petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan*. 2-4.

sustainable. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*).²⁸

Masalah pemberdayaan masyarakat tidak pernah lepas dari masalah pembangunan dan perubahan sosial. Pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan suatu proses swadaya masyarakat yang diintegrasikan dengan usaha-usaha Pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat dibidang ekonomi, sosial, politik dan kultural, serta untuk mensinergikan gerakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa. Sebagai suatu metode atau pendekatan, pengembangan masyarakat menekankan adanya proses pemberdayaan, partisipasi dan peranan langsung warga komunitas dalam proses pembangunan di tingkat komunitas dan antarkomunitas.²⁹

Pembangunan sosial menurut Midgley adalah pendekatan pembangunan yang secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial seperti dua sisi koin yang saling melengkapi satu sama lain.

Dalam pandangan islam pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma islam sendiri sebagai agama perubahan.³⁰

²⁸ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, 24-25.

²⁹ Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, V.

³⁰ <http://cintailmupengetahuan.blogspot.com/2011/04/pemberdayaan-ekonomi.html?m=1> tanggal akses 16 April 2015

Dalam arti lain pemberdayaan ekonomi dalam islam menurut Ali Syari'ati, dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan atau pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezaliman dengan ungkapan kata zhulm, itsm, dhalal, dll. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan dalam surat al Hasr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
 يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
 وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.³¹

³¹ Agama RI, *ALHIDAYAH Al-Qur'an Tafsir*, 547.

Al-Qur'an dengan tegas mengatakan supaya harta itu tidak beredar dikalangan orang kaya saja diantara kamu.³²

Sedangkan menurut hadits arbain tentang pemberdayaan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ فِي عَمَلِهِ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسْبُهُ مُسْلِمٌ رَوَاهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke

³² <http://syukronassyakur.blogspot.com/2013/08/pengertian-pemberdayaan-masyarakat.html?m=1>
tanggal akses 16 April 2015

syurga. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. (Riwayat Muslim).³³

Penjelasan Hadist di atas sebagai berikut:

1. Siapa yang membantu seorang muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, maka akan dia dapatkan pada hari kiamat sebagai tabungannya yang akan memudahkan kesulitannya di hari yang sangat sulit tersebut.
2. Sesungguhnya pembalasan disisi Allah ta'ala sesuai dengan jenis perbuatannya.
3. Berbuat baik kepada makhluk merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala.
4. Membenarkan niat dalam rangka mencari ilmu dan ikhlas di dalamnya agar tidak menggugurkan pahala sehingga amalnya dan kesungguhannya sia-sia.
5. Memohon pertolongan kepada Allah ta'ala dan kemudahan dari-Nya, karena ketaatan tidak akan terlaksana kecuali karena kemudahan dan kasih sayang-Nya.
6. Selalu membaca Al Quran, memahaminya dan mengamalkannya.
7. Keutamaan duduk di rumah Allah untuk mengkaji ilmu.

³³ Imam Nawawi, *Hadits Arbain*, terj. Abdul Muhaimin As'ad (Surabaya”Bintang Terang, 1985), 55-56.

d. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Suatu Program Dan Proses

Semua program-program yang di-canangkan untuk masyarakat miskin ini haruslah melalui upaya yang akan dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat desa. Adapun upaya-upaya pemberdayaan, yaitu:

1) Pemberdayaan sebagai suatu program

Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah di-tentukan jangka waktunya.

2) Pemberdayaan sebagai suatu proses

Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (*on going process*). Untuk melihat apa yang dimaksud dengan pemberdayaan sebagai *on going process*, mungkin dapat dilihat apa yang dikemukakan oleh Hogan yang mengutip dari pandangan Rotter, Selignan dan Hopson dan Scally yang melihat proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja (*Empowerment is not an end state, but a process that all human being experience*). Hal ini juga berlaku pada suatu masyarakat, dimana dalam suatu komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program. Baik

program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama sendiri.³⁴

e. Peran Pelaku Perubahan (*Change Agent*) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Peran pelaku perubahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dalam kaitan dengan peran pelaku perubahan dalam diskursus komunitas. Dalam diskursus ini, pelaku perubahan memainkan peran sebagai *community worker* ataupun *enabler*. Sebagai *community worker*, Ife melihat sekurang-kurangnya ada empat peran dan ketrampilan utama yang nantinya secara lebih spesifik akan mengarah pada teknik dan ketrampilan tertentu yang harus dimiliki seseorang *community worker* sebagai pemberdayaan masyarakat. Keempat peran dan ketrampilan tersebut adalah:

- 1) Peran dan ketrampilan fasilitatif (*facilitative roles and skill*)
- 2) Peran dan ketrampilan edukasional (*educational roles and skill*)
- 3) Peran dan ketrampilan perwakilan (*representational roles and skill*)
- 4) Peran dan ketrampilan teknis (*technical roles and skill*)³⁵

Dalam konteks pendampingan masyarakat ada tiga peran dan tugas yang menjadi tanggung jawab para pekerja masyarakat, yaitu:

³⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 215.

³⁵ Ibid, 215.

- 1) Peran pendamping sebagai motivator
- 2) Peran pendamping sebagai komunitas
- 3) Peran pendamping sebagai fasilitator³⁶

f. Tujuan Pemberdayaan

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi pasti memiliki tujuan. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Demikian pula halnya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ia memiliki tujuan antara lain:

- 1) Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup
- 2) Untuk mencapai tujuan yang bersifat umum tersebut maka terdapat beberapa tujuan atau sasaran antara yaitu:
 - a) Perbaikan kelembagaan
 - b) Perbaikan pendapatan
 - c) Perbaikan lingkungan hidup
 - d) Perbaikan akses
 - e) Perbaikan tindakan
 - f) Perbaikan usaha produktif
 - g) Perbaikan perbaikan bidang lainnya³⁷

³⁶ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, 64.

³⁷ Soleh, *Dialektika Pembangunan*, 81-82.

3. Kendala yang dihadapi PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat

a. Pinjaman Bermasalah

Dalam lembaga keuangan/Bank, pinjaman bermasalah didasarkan pada tingkat kolektibilitas yang aturannya ditentukan oleh Bank Indonesia. Tingkat kolektibilitas tersebut mencakup permasalahan seperti : manajemen peminjam, tingkat pertumbuhan industry, pengembalian, permodalan, *coverage* jaminan dan sebagainya. Penilaian tingkat kolektibilitas tersebut sulit diterapkan pada program masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir dengan nasabah kelompok khususnya kegiatan pinjaman program karena selain pengguna tingkat kelompok (dengan berbagai jenis usaha, fungsi dan tingkat perkembangan kelompok) masih terdapat beberapa factor lainnya diantaranya seperti permodalan yang sulit dinilai, jaminan tidak ada, tidak ada *negative list* sektor usaha. Untuk menjembatani kebutuhan tentang definisi pinjaman bermasalah yang sesuai dengan program maka pinjaman bermasalah di batasi berdasarkan kelancaran pembayaran kelompok kepada UPK dengan ketentuan adalah :

- 1) Tunggakan angsuran di atas 3 bulan untuk jadwal pinjaman yang di angsur tiap bulan.
- 2) Tunggakan angsuran di atas 4 bulan untuk jadwal pinjaman per triwulan.

3) Tunggakan angsuran di atas 7 bulan untuk jadwal pinjaman per 6 bulan.

Keempat hal tersebut memang belum memperhatikan hal-hal yang bersifat kondisi usaha baik kelompok ataupun individu pemanfaat. Dalam melakukan identifikasi pinjaman bermasalah. UPK dapat menggunakan data-data yang ada seperti laporan perkembangan pinjaman, laporan kolektibilitas, dan laporan pinjaman kelompok bermasalah. Hasil identifikasi tersebut sebagai instrument verifikasi dan validasi kondisi pada tingkat kelompok yang di lakukan oleh UPK dengan Tim Penyehatan Pinjaman.

b. Penggolongan Permasalahan

- 1) Permasalahan Kelembagaan:** adalah permasalahan yang disebabkan oleh kurang berfungsinya kelembagaan-kelembagaan yang dibangun oleh program sebagaimana mestinya yaitu:
- a) Permasalahan kelembagaan pada kelompok peminjam yang disebabkan oleh bubarnya kelompok, pengurus tidak aktif, aktivitas kelompok tidak ada dan sebagainya.
 - b) Permasalahan kurang kuatnya aturan pada kelembagaan kelompok, seperti pengurus kelompok tidak mengembalikan angsuran kelompok pada UPK, pemanfaat dari kelompok Simpan Pinjam atau Aneka Usaha tidak membayar angsuran pada kelompok.

- c) Permasalahan kelembagaan kecamatan, misalnya Tim Verifikasi dan Badan Pengawas UPK yang tidak berfungsi dan mengakibatkan terjadinya kelompok fiktif, kelompok tidak ada usaha dan sebagainya.

2) Permasalahan *microfinance* adalah permasalahan yang disebabkan oleh kemampuan keuangan kelompok baik yang disebabkan oleh permasalahan usaha/kegiatan maupun l'tikad pada tingkat kelompok/pemanfaat sehingga mengakibatkan pengembalian ke UPK terkendala dengan kondisi sebagai berikut:

- a) Kondisi keuangan atau usaha kelompok tidak mampu mengembalikan.
- b) Kondisi keuangan atau usaha pemanfaat tidak mampu mengembalikan.
- c) Kesalahan pada ketentuan jadwal pengembalian yang tidak sesuai dengan siklus usaha kelompok maupun pemanfaat.

3) Permasalahan *penyelewengan* adalah permasalahan yang diakibatkan adanya penyalahgunaan dana yaitu:

- a) Pemotongan dana pada saat penyerahan dana pinjaman ke kelompok oleh TPK sehingga kelompok/pemanfaat hanya mengakui sejumlah dana yang diterima saja.
- b) Pemotongan dana pada saat penyerahan dana ke pemanfaat oleh pengurus kelompok sehingga pemanfaat hanya membayar kewajiban sesuai dengan jumlah dana yang diterima.

- c) Penyalahgunaan dana pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK (bagi lokasi yang menggunakan TPK), dan sebagainya.
- d) Adanya kelompok fiktif

4) Permasalahan *force majeure* adalah permasalahan yang diakibatkan oleh bencana alam, huru-hara, peering dan kematian pemanfaat atau musibah yang bersifat bukan akibat dari kurangnya antisipasi resiko usaha. Contoh resiko usaha adalah gagal panen, ternak mati, perampokan, kebakaran lokasi usaha, dsb.³⁸

4. Upaya untuk menangani kendala PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi

a. Penyelesaian Kredit Macet

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1) Rescheduling, yaitu dengan cara:

a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit

³⁸ Direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, *penjelasan X petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan*. 27-28

dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b) *Memperpanjang jangka waktu angsuran*

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

a) *Kapitalisasi bunga*, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.

b) *Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu*.

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c) *Penurunan Suku Bunga*

Penurunan suku dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan nasabah.³⁹

³⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Rajawali,2008), 109-111.

Pengurangan kewajiban adalah pola penyehatan pinjaman bermasalah yang memberikan pengurangan jasa pinjaman jika mempunyai i'tikad pengembalian pokok dengan jasa pinjaman secara sekaligus seluruhnya untuk tunggakan pokok dan jasa pinjaman. Pola ini bisa digunakan untuk penyebab *force majeure* dengan memberikan pengurangan pokok atau jasa pinjaman sampai dengan 100%.⁴⁰

d) Pembebasan Bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3) *Restructuring*, yaitu dengan cara:

- a) Menambah jumlah kredit
- b) Menambah *equity* yaitu: dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.⁴¹

Restrukturisasi Pinjaman adalah melakukan perubahan pola angsuran yang dikaitkan dengan realitas penggunaan dana. Restrukturisasi ini memungkinkan terjadinya perubahan jadwal angsuran dengan perpanjangan waktu pinjaman, perubahan pola angsuran misalnya dari bulanan menjadi triwulan, perubahan

⁴⁰Direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, *penjelasan X petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan*. 33.

⁴¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*,109-110.

jumlah angsuran dan juga dilakukan persyaratan pinjaman yang baru.⁴²

4) *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

5) *Penyitaan jaminan*

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.⁴³



⁴² Direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa, *penjelasan X petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan*. 32.

⁴³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 110-111.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan cara ilmiah, data ilmiah dan kegunaan. Dengan metode penelitian, akan memadu peneliti bagaimana penelitian itu dilakukan.⁴⁴

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah : merupakan suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik lebih tertarik menelaah fenomene-fenomene sosial budaya dalam suasana yang berlangsung secara ilmiah.⁴⁶ Sedangkan istilah deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat (karakteristik) suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahan.⁴⁷

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data asli dan alamiah artinya suatu data yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan memiliki makna mendalam, sehingga

⁴⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2014), 51.

⁴⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 6.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta:Rineka Cipta, 2006),12.

⁴⁷ Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 57.

melalui pendekatan kualitatif setiap fenomena yang ada di lapangan dan berkaitan dengan tujuan penelitian dapat dipahami secara mendalam sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan data yang diperoleh mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik yang tidak nampak.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁴⁹ Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. karena lokasi tersebut sebagian masyarakatnya kurang mampu dalam ekonomi, namun dengan adanya PNPM di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo masyarakat lebih terbantu dan kehidupannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Berbeda dengan desa-desa yang lainnya PNPM Mandiri yang ada di desa Maron kidul Kecamatan Maron Kabupaten Prbolinggo Masih tetap menjalankan Programnya walaupun sudah tidak lagi mendapatkan bantuan dana dari pemerintah melainkan hanya melanjutkan asset yang ada.

C. Subyek Penelitian

Penelitian menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 13.

⁴⁹ STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 46.

misalnya dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian.⁵⁰

Adapun subjek penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah :

- a. Ketua UPK- PNPM
- b. Bendahara UPK-PNPM
- c. Ketua Kelompok SPP
- d. Anggota Kelompok SPP

Para informan tersebut ditentukan karena dapat memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian yang mengkaji tentang sistem penyaluran dana PNPM Mandiri upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁵¹ Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 218-219.

⁵¹ *Ibid.*, 224.

fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵² Dalam hal ini peneliti observasi non partisipatif, dimana peneliti hanya mengamati objek penelitian tanpa ikut terlibat dalam kegiatan.

Alasan dimanfaatkannya metode ini adalah sebagai berikut:

- a. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, sehingga lebih meyakini peneliti.
- b. Teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat, mengamati, dan mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d. Jalan terbaik untuk mengecek kepercayaan data tersebut ialah dengan jalan memanfaatkan pengamatan.
- e. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi yang rumit.
- f. Dalam kasus tertentu dimana komunikasi tidak memungkinkan, maka pengamatan bisa dimanfaatkan.⁵³

Melalui metode observasi, data yang diperoleh adalah data penunjang, di antaranya:

- a. Letak lokasi penelitian.
- b. Situasi dan kondisi obyek penelitian.

⁵²Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*, 128.

⁵³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, 174-175.

c. Data mengenai sistem penyaluran dana PNPB Mandiri

Sedangkan prosedur pelaksanaannya dalam metode observasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan peninjauan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat observasi.
- b. Menyusun pedoman observasi yang sesuai dengan masalah yang akan dijadikan ruang lingkup penelitian.
- c. Mengadakan observasi secara langsung terhadap peristiwa obyek penelitian, serta mencatat hasil yang diperoleh.
- d. Mendeskripsikan hasil observasi yang sesuai dengan jenisnya.

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁴

Metode wawancara yang digunakan adalah bentuk “*semi structured*”. Dalam hal ini pewawancara (interviewer) menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁵⁵

⁵⁴Ibid., 186.

⁵⁵Arikunto, *Pendekatan Teoritik*, 227.

Adapun metode interview ini digunakan untuk memperoleh data, diantaranya:

- a. Program PNPM upaya memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
- b. Sistem Penyaluran dana PNPM upaya memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
- c. Kendala PNPM Untuk memberdayakan Masyarakat di Desa maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
- d. Upaya untuk menangani kendala PNPM Untuk memberdayakan Masyarakat di Desa maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁶

Dengan demikian maka jelaslah bahwa metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti buku-buku, laporan, arsip, majalah dan sebagainya.

Adapun data yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi adalah:

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 240.

- a. Sejarah atau latar belakang berdirinya PNPM Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
- b. Struktur Organisasi
- c. Denah Desa
- d. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian.
- e. Jumlah kelompok SPP di Desa Maron Kidul

E. Analisis data⁵⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam analisis data antara lain:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

⁵⁷ Ibid., 246-253.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau *verifikasi* hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga *diverifikasi* selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, Kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan Validitasnya.⁵⁸

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁵⁹ Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁶⁰

Hal ini dicapai dengan jalan di antaranya:

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 246-253.

⁵⁹ *Ibid.*, 241.

⁶⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶¹

G. Tahap-tahap penelitian

Pada tahapan ini akan diuraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penyusunan laporan.⁶²

Untuk mengetahui proses penelitian oleh peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan akan tahap-tahap penelitian. Tahapan penelitian yang dilalui peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahapan penelitian pra lapangan terdapat enam tahapan.

Adapun enam tahapan tersebut yaitu:⁶³

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik penelitian

⁶¹ Ibid., 331.

⁶² STAIN. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

⁶³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 127-128.

yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga diseminarkan.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Di Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

c. Mengurus Perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu harus mengurus dan meminta surat perizinan penelitian dari pihak kampus. Setelah meminta surat izin penelitian, peneliti menyerahkan kepada Kepala Desa untuk mengetahui apakah diizinkan mengadakan penelitian atau tidak.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Setelah memperoleh izin, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang obyek penelitian, lingkungan pendidikan dan lingkungan informan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang dipilih.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan, maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun kelapangan yakni mulai dari alat tulis seperti pensil, pena, buku catatan, kertas dan sebagainya.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung kelokasi penelitian, namun disamping itu peneliti hendaknya mempersiapkan diri mulai dari pemahaman akan latar belakang penelitian, mempersiapkan fisik, mental dan sebagainya.

3. Tahap Analisa Data

Pada tahap ini di bahas prinsip pokok, tetapi tidak akan dirinci bagaimana cara analisis data itu dilakukan, karena ada bab khusus yang mempersoalkannya.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah PNPM Mandiri Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Kemudian untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang obyek penelitian ini dapat dikemukakan secara sistematis sebagai berikut.

1. Profil Wilayah

Wilayah Kecamatan Maron terletak di Kabupaten Probolinggo Berbatasan dengan:

- a. Utara : Kecamatan Gending dan Pajarakan Kabupaten Probolinggo
- b. Selatan : Kecamatan Gading dan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo
- c. Timur : Kecamatan Pajarakan dan Gading Kabupaten Probolinggo
- d. Barat : Kecamatan Banyuanyar dan Gending Kabupaten Probolinggo

Probolinggo terdiri dari 18 Desa.⁶⁴

2. Gambaran Umum⁶⁵

Sejak awal tahun 2008 Maron menerima bantuan Program PNPM

Mandiri Perdesaan dengan pengelolaan dana antara lain :

⁶⁴ **Sumber Data:** Hasil Observasi UPK Maron Kidul.

⁶⁵ **Sumber data:** Dokumen kantor UPK kecamatan Maron kabupaten probolinggo

a. Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Tabel 4.1
Alokasi Bantuan Langsung

Tahun	Jumlah (Rp)
2008	3.000.000.000
2009	2.000.000.000
2010	3.000.000.000
2011	3.000.000.000
2011	850.000.000
2012	3.000.000.000
2013	3.000.000.000
2014	2.234.500.000
TOTAL	20.083.500.000

(Sumber Data: Dokumentasi Kantor UPK Kecamatan maron)

b. Alokasi DOK

Alokasi DOK sejak tahun 2008 sampai saat ini (19 Maret 2015) ;

Tabel 4.2
Alokasi DOK

NO.	ASAL MODAL	NOMINAL	KET.
1	DOK Perencanaan PNPM-MP T.A. 2008	Rp. 50.160.000,-	Terserap 100%
2	DOK Pelatihan PNPM-MP T.A. 2008	Rp. 83.600.000,-	Terserap 100%
3	DOK Perencanaan PNPM-MP T.A. 2009	Rp. 44.800.000,-	Terserap 100%
	DOK Pelatihan PNPM-MP		

4	T.A. 2009 DOK Perencanaan PNPM-MP T.A. 2010	Rp. 28.385.000,-	Terserap 100%
5	DOK Pelatihan PNPM-MP T.A. 2010 DOK RPJMDes T.A. 2010	Rp. 44.800.000,-	Terserap Rp. 43.105.000,-, sisa dana Rp. 1.695.000,-
6	DOK Perencanaan PNPM-MP T.A. 2011	Rp. 29.885.000,-	Terserap Rp. 28.012.000,-, sisa dana Rp. 1.873.000,-
7	DOK Pelatihan PNPM-MP T.A. 2011	Rp. 29.885.000,-	Terserap Rp. 29.885.000,-
8	DOK PNPM-MP Kecamatan Maron T.A. 2012	Rp. 56.000.000,-	Terserap Rp. 56.000.000,-
9	DOK PNPM-MP Kecamatan Maron T.A. 2013	Rp. 91.290.000,-	Terserap Rp. 91.290.000,-
10	DOK PL-UPK PNPM-MP Kecamatan Maron T.A. 2013	Rp. 111.625.000,-	Terserap Rp. 119.903.000,-
11	DOK PNPM-MP Kecamatan Maron T.A. 2014	Rp. 12.000.000,-	Terserap Rp. 119.903.000,- Sisa Rp. 0,-
12	DOK PL-UPK PNPM-MP Kecamatan Maron T.A. 2014	Rp. 82.196.000,-	Terserap Rp. 12.000.000,- Sisa Rp. 0,-
13	DOK PNPM-MP Kecamatan Maron T.A. 2014	Rp. 12.000.000,-	Terserap Rp. 12.000.000,- Sisa Rp. 0,-
14	DOK PL-UPK PNPM-MP Kecamatan Maron T.A. 2014	Rp. 12.000.000,-	
15			

			Terserap Rp. 72.428.700,- Sisa Rp. 9.767.300,- Terserap Rp. 10.000.000,- Sisa Rp. 2.000.000,-
TOTAL		Rp. 690.561.400,-	

(Sumber Data: Dokumentasi Kantor UPK Kecamatan maron)

3. Struktur Kelembagaan PNPM-MPd

Susunan pelaku Kelembagaan tingkat Kecamatan PNPM Mandiri
Perdesaan Kecamatan Maron

a. Pengurus BKAD

Tabel 4.3
Pengurus BKAD

Jabatan	Nama
Koordinator	H. M. Romli Fj.
Bendahara	Muhyidi
Sekretaris	Samsul Arifin

(Sumber Data: Dokumentasi Kantor UPK Kecamatan maron)

b. Pengurus Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK)

Tabel 4.4
BP-UPK

Jabatan	Nama
Ketua	Abdul Hamid
Anggota	Heri Budiono
Anggota	Iwantoro

(Sumber Data: Dokumentasi Kantor UPK Kecamatan maron)

c. Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Tabel 4.5
Pengurus UPK

Jabatan	Nama
Ketua	Sanawi
Sekretaris	Imron Faisol
Bendahara	Dyah Listyaning Wibowo

(Sumber Data: Dokumentasi Kantor UPK Kecamatan maron)

d. Tim Verifikasi Perguliran

Tabel 4.6
Tim verifikasi Perguliran

Jabatan	Nama
Ketua	Nanik Sukeni
Anggota	Misnaji
Anggota	Abdillah Hasan

(Sumber Data: Dokumentasi Kantor UPK Kecamatan maron)

e. Tim Pendanaan

Ketua : Karsani

Sekretaris : Ike Ristaulina

Anggota : Romayyah, Wulan Febriana, Arbuati,
Suliha, Rukminingsih, Yulis Sedia S.,
Lutfiyah, Makrufiati, Suci, Sucianingsih,
Siti Asiyah

IAIN JEMBER

f. Tim Penanganan Masalah (TPM)

Ketua : Yunus Anis, S.Pd.

Anggota : Samsul Hadi, S.Pd., Moh. Isma'il, S.Pd.,
Taufik, S.Pd. Misbahul Layli, Nanik

Rofiq⁶⁶

4. Sejarah Pendirian dan Kepengurusan UPK

Pengurus UPK Kecamatan Maron ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2008 oleh Forum dan dikuatkan dengan surat penetapan Camat. Berdasarkan hasil keputusan forum MAD maka susunan kepengurusan UPK adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua	Drs. Fatchurrozi
Sekrearis	Dyah Listiyaning Wibowo
Bendahara	Achmad Isfandi

Setelah berlangsung beberapa bulan, bendahara UPK yang bernama Achmad Isfandi mengundurkan diri dari kepengurusan karena da tugas penting yang tidak bisa ditinggalkan. Karena berkurangnya pengurus maka direkrutlah lagi seorang pengurus yang menggantikannya. Maka ditetapkanlah kembali kepengurusan UPK dalam MAD pada bulan februari 2009 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua	Drs. Fatchurrozi
Sekrearis	Sanawi
Bendahara	Dyah Listiyaning Wibowo

⁶⁶ **Sumber data:** Dokumen kantor UPK kecamatan Maron Kidul kabupaten probolinggo

Tetapi tidak lama kemudian pada bulan Mei 2009, ketua UPK yang bernama Drs. Fatchurrozi juga mengundurkan diri dari kepengurusan UPK. Karena kekurangan tenaga untuk menjalankan tugas-tugas UPK yang kebetulan pada waktu itu persiapan untuk tahun anggaran 2009, maka perekrutan diadakan segera mungkin dan pada akhirnya diambilkan dari cadangan I saat perekrutan ke-2. Kemudian kepengurusan UPK kembali ditetapkan ketiga kalinya dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:⁶⁷

Jabatan	Nama
Ketua	Sanawi
Sekrearis	Imron Faisol
Bendahara	Dyah Listiyaning Wibowo

5. Struktur Kepengurusan UPK dan Tupoksinya

Pengurus UPK Kecamatan Maron terdiri dari 4 orang mengacu pada kebutuhan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan yaitu:

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

Tugas Umum Pengurus

- 1) Melakukan Sosialisasi program PNPM-Mpd
- 2) Melakukan pembinaan administrasi di TPK dan kelompok pemanfaatan
- 3) Melakukan penagihan pengembalian UEP/SPP sesuai rencana apabila terjadi tunggakan

⁶⁷ **Sumber data:** Dokumen kantor UPK kecamatan Maron Kidul kabupaten probolinggo

- 4) Pengendalian organisasi
- 5) Sebagai panitia penyelenggara kegiatan PNPM-Mpd tingkat kecamatan
- 6) Mempertanggungjawabkan kegiatan dan keuangan dalam forum MAD

b. Ketua UPK

- 1) Memimpin rapat /pertemuan UPK mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat terkait.
- 2) Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari sekretaris maupun bendahara
- 3) Menandatangani surat-surat laporan, pencairan dari bank, pembukaan rekening, pencairan ke Desa, kitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain, specimen rekening dana kolektif, dana operasional UPK, DOK dan dana pengembalian.
- 4) Pemeriksaan RPD dan LPD

c. Sekretaris UPK

- 1) Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan PNPM-MPd.
- 2) Menempelkan/memberikan informasi tentang pertanggungjawaban keuangan, informasi kegiatan kepada masyarakat melalui papan informasi dan media informasi lainnya
- 3) Mencatat proses dan hasil keputusan rapat
- 4) Mengisi dan mencatat agenda harian

- 5) Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan
- 6) Mengelola inventaris
- 7) Merencanakan pengadaan administrasi kantor dan Membuat surat

d. Bendahara UPK

- 1) Mencatat setiap transaksi keuangan
- 2) Membuat laporan keuangan
- 3) Memegang dan menyimpan semua rekening Bank dana PNPM-MPd
- 4) Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan ketua
- 5) Mengisi form-form laporan keuangan
- 6) Menyetor dan mengambil uang di Bank atas persetujuan ketua
- 7) Menandatangani kwitansi atas persetujuan ketua.

6. Pelaksanaan Kegiatan Pengurus UPK

a) Perencanaan Kegiatan

Rencana Kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

- 1) Pendampingan dan pembinaan kelompok
- 2) Rapat koordinasi bulanan kelembagaan
- 3) Rapat koordinasi (asosiasi UPK)
- 4) Penagihan angsuran
- 5) Identifikasi terhadap kelompok yang menunggak
- 6) Mengisi pertemuan Musyawarah Desa/kelompok
- 7) Pendampingan verifikasi perguliran
- 8) Membuat rencana perguliran kelompok

9) Mengadakan musyawarah Tim Pendanaan Perguliran

10) Melakukan pencairan Perguliran SPP

b) Pelaksanaan Kegiatan

1) Jam kerja

2) Pelayanan kantor:

Masuk : jam 08.00

Istirahat : jam 12.00

Pulang : jam 16.00

3) Keterangan:

Pelayanan Angsuran Kelompok SPP : jam 08.00 WIB s/d 14.00

WIB

Setoran ke bank : jam 14.00 WIB

Entri laporan LPP : jam 14.30 WIB s/d 15.00

WIB

7. Visi, Misi dan Tujuan UPK

a. Visi UPK

“Meningkatkan Masyarakat Peduli dan Kreatif”

b. Misi UPK

1) Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal Bagi kesejahteraan Masyarakat

2) Memberdayakan kelompok Masyarakat menuju kemandirian

3) Menjembatani masyarakat dalam memajukan usaha

4) Menjadi agen pemberdayaan Masyarakat

c. Tujuan UPK

Turut membantu Pemerintah dalam penungkatan SDM sehingga dapat mempercepat menanggulangi kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat Kecamatan Maron melalui peningkatan kepedulian masyarakat dan kreatif dalam menyelenggarakan pembangunan Desa dan atau antar Desa serta meningkatkan penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Maron.⁶⁸

8. Keadaan Demografi Desa maron Kidul

a. Jumlah penduduk

Dari data yang ada di desa maron kidul, jumlah penduduk dalam tahun 2014 berjumlah 1.872 jiwa yang terdiri dari 4.060 jiwa penduduk perempuan dan 3.835 jiwa penduduk laki-laki.⁶⁹

b. Keadaan ekonomi

Jika dilihat dengan cermat, terdapat beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi desa maron kidul yang paling signifikan adalah sektor pertanian. Hal ini didukung oleh luasnya lahan pertanian yang mendominasi sekitar 80% dari seluruh wilayah desa maron kidul. Sekaligus kurang lebih 60% mata pencaharian masyarakat desa maron kidul adalah petani dan buruh tani.

Disamping itu pula sektor perdagangan cukup baik terutama sejak

⁶⁸ **Sumber data:** Dokumen kantor UPK kecamatan Maron Kidul kabupaten probolinggo

⁶⁹ **Sumber data:** Dokumen Kantor Desa Maro Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

ditopang oleh pinjaman lunak bagi usaha rumah tangga melalui program Simpan Pinjam Perempuan dari Program PNPM.⁷⁰

Tabel 4.7
Jumlah penduduk menurut pencaharian

NOMOR	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH JIWA
1	2	3
1	Buruh Tani	2000
2	Petani Pemilik Sawah	615
3	Peternakan	50
4	Perdagangan	200
5	Tukang Kayu	25
6	Tukang Batu	25
7	Penjahit	13
8	PNS	700
9	Pensiunan	35
10	TNI / Polri	8
11	Perangkat Desa	13
12	Pengrajin	10
13	Industri Kecil	12
14	Buruh Industri	105
15	Lain-lain	743

(Sumber data: Dokumentasi Desa Maron Kidul)

B. Penyajian Data dan Analisis

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat dalam penelitian. Sebab data inilah yang akan dianalisis, sehingga dari data yang dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini. Sesuai dengan tehknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan pengumpulan data yaitu

⁷⁰ **Sumber data:** Dokumen Kantor Desa Maro Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

hasil observasi yang dilakukan peneliti yang kemudian akan diperkuat dengan data hasil interview.

1. Program PNPM Mandiri Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat

Sejak tahun 2008 Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo mendapat bantuan dari pemerintah dalam program PNPM Mandiri perdesaan yaitu dengan diberi modal pertama kali hingga sekarang yaitu:

Tahun	Jumlah (Rp)
2008	3.000.000.000
2009	2.000.000.000
2010	3.000.000.000
2011	3.000.000.000
2011	850.000.000
2012	3.000.000.000
2013	3.000.000.000
2014	2.234.500.000
TOTAL	20.083.500.000

Secara umum , dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) PNPM Mandiri perdesaan dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan di bidang peningkatan kapasitas pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perdesaan, kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan ekonomi melalui perguliran dana. Baik melalui skema Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun simpan pinjam khusus perempuan (SPP).

Namun sejak januari tahun 2015 dana untuk BLM dihentikan sementara. Jadi untuk PNPM di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron

Kabupaten Probolinggo hanya menjalankan program PNPM untuk Dana bergulir, yaitu Simpan Pinjam Khusus Perempuan dan usaha ekonomi produktif.

Berikut penuturan ketua PNPM kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

“Tahun 2015 sudah tidak ada lagi istilah PNPM phase Out dan atau suntikan dana sudah tidak ada lagi. karena sudah ada penetapan per 4 januari 2015 PNPM istilahnya bantuan dari pusat tidak ada, jadi kita hanya mengelolah asset yang ada yaitu asset Simpan Pinjam Khusus Perempuan, untuk istilahnya masih tetap PNPM hanya saja kita mengelola Simpan Pinjam Perempuan.”⁷¹

Seperti yang telah dituturkan oleh ketua UPK-PNPM Mandiri bahwa PNPM sudah tidak lagi mendapatkan suntikan dana dari pusat, maka PNPM mengambil langkah melanjutkan asset yang ada dengan program Simpan Pinjam Perempuan.

Dengan adanya program simpan pinjam yang di laksanakan oleh PNPM ini memberikan suatu perubahan kepada masyarakat khususnya para anggota SPP desa Maron Kidul bisa merubah perekonomiannya lebih baik dan mapan.

Hal ini juga dipaparkan oleh anggota Simpan Pinjam Perempuan:

“ya sangat membantu ndok, awalnya dagangannya saya kecil ndok dan dengan adanya SPP ini saya bisa mengembangkan usahanya saya, contohnya saja yang kamu lihat ini ndok wes lumayan banyak kan barang dagangannya kan, ya alhamdulillah wes mapan ndok”.⁷²

⁷¹ Sanawi, *Wawancara*, Maron Kidul, 12 Mei 2015

⁷² Siti Aisyah, *Wawancara*, Maron Kidul. 28 Mei 2015

2. Prosedur Penyaluran dana PNPM Mandiri Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Sosialisasi Penyaluran Dana PNPM

Program yang dicanangkan oleh pemerintah, upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM adalah upaya yang sangat efektif. Terutama Desa Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo yang kebanyakan penduduknya adalah warga kurang mampu atau dalam PNPM disebut dengan sebutan RTM (Rumah Tangga Miskin), dalam menuntaskan permasalahan ini PNPM Desa Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo mengadakan program dana bergulir yaitu UEP (Usaha Ekonomi Produktif), sarana prasarana, dan SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Untuk melancarkan semua program ini, PNPM Desa Maron Kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo merencanakan suatu kegiatan yang dilakukan Oleh PNPM kepada masyarakat, untuk memperkenalkan program tersebut PNPM membentuk sebuah strategi yaitu dengan cara sosialisasi.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ketua UPK bahwa:

“strateginya dari pembuatan proposal. sebelum pembuatan proposal, mensosialisasikan kepada masyarakat lewat pamflet media bener musyawarah-musyawah itu sosialisasi sekaligus di papan informasi juga disampaikan di tempelkan setelah itu membantu memfasilitasi untuk pembuatan proposal”.⁷³

Sebagaimana pernyataan dari ketua UPK-PNPM bahwa strategi untuk melaksanakan program PNPM diperlukan sosialisasi kepada

⁷³ Sanawi, *Wawancara*, Maron Kidul, 11 Mei 2015

masyarakat yaitu sosialisasi melalui pamflet, media benner serta musyawarah-musyawah warga dan kemudian melalui pembuatan proposal.

1) **Pertemuan langsung.**

Sosialisasi dan penyebaran informasi melalui pertemuan langsung dilakukan oleh PNPM kepada warga Maron kidul Kec. Maron Kab. Probolinggo, sosialisasi ini diadakan oleh PNPM disetiap kantor Desa, dimana sosialisasi PNPM ini guna memberikan arahan atau pengetahuan kepada warga yang akan di berikan suatu materi untuk mendapatkan suatu gambaran tentang Program PNPM. Biasanya ada dua sosialisasi menurut PNPM yaitu Musyawarah antar Desa dan musyawarah Desa.

a) Musyawarah antar Desa.

Musyawarah antar Desa (MAD) sosialisasi yang merupakan pertemuan masyarakat antar Desa untuk menyampaikan informasi mengenai tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM mandiri perdesaan. MAD sosialisasi juga merupakan pertemuan untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar Desa dalam melaksanakan PNPM mandiri perdesaan.

Menurut Bendahara UPK-PNPM Mandiri perdesaan:

“MAD sosialisasi biasanya kita undang elemen-elemen dari desa yaitu kepala desa, tokoh masyarakat, wakil masyarakat perempuan, biasanya kita sosialisasi program-

programnya kita, visi misi kita seperti apa dan program-programnya kita seperti apa, gitu”

Menurut Sanawi selaku ketua UPK-PNPM bahwa:

“Para Peserta yang di undang oleh PNPM adalah BPD dan anggota anggota BPD lainnya, yang membahas tentang tujuan dan bagaimana PNPM dilaksanakan Desa untuk memajukan masyarakat Desa masing- masing agar masyarakatnya menjadi lebih makmur”⁷⁴.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam musyawarah antar desa pihak PNPM mengundang perangkat-perangkat desa yaitu seperti kepala desa, tokoh masyarakat, wakil masyarakat perempuan dan membahas program-program PNPM serta Visi dan Misi PNPM.

b) Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa (Musdes) sosialisasi sebagai ajang sosialisasi atau penyebaran informasi PNPM mandiri di tingkat Desa, mengadakan suatu kegiatan yang dilakukan warga Desa.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ketua UPK bahwa:

“Musyawarah Desa merupakan Musyawarah yang mana nanti usulan-usulan dari tingkat dusun di angkat di musyawarah Desa tersebut. kemudian usulan-usulan yang di tampung di dusun-dusun di angkat di tingkat Desa nanti Desa sendiri diangkat di kecamatan”⁷⁵

Sesuai dengan hasil interview dengan ketua PNPM Sanawi Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo bahwa Musyawarah Desa sebagai ajang sosialisasi di tingkat Desa.

⁷⁴ Sanawi, *Wawancara*, Maron Kidul, 11 Mei 2015

⁷⁵ Dyah Listyaning Wibowo, *Wawancara*, Maron Kidul, 15 Mei 2015

Dimana usulan dari setiap warga dusun dimusyawarahkan ditingkat Desa.

Musyawarah Desa ini diperlukan tokoh-tokoh penting yang diikuti sertakan sebagai kegiatan sosialisasi yaitu Kepala Desa dan aparat Desa, BPD, lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM), wakil RTM Desa, Wakil Perempuan, LSM, Tokoh Masyarakat dan tokoh agama.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bendahara UPK-PNPM bahwa:

“Musyawarah di tingkat Desa, dimana undangan yang di undang pesertanya antara lain tokoh masyarakat, tokoh masyarakat laki-laki dan tokoh masyarakat perempuan, kader pemberdayaan, Tim Pengelolah kegiatan Kepala Desa dan tokoh tokoh yang lainnya.”⁷⁶

2) Media Informasi

Selain melalui pertemuan-pertemuan langsung dengan masyarakat, pelaku PNPM mandiri pedesaan didorong untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui media-media informasi seperti; spanduk, brosur.

a) Spanduk.

Spanduk menjadi suatu alternatif media komunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan, memberikan sesuatu, meningkatkan kesadaran dan membangkitkan motivasi masyarakat. Misalnya mengajak masyarakat

⁷⁶ Sanawi, *Wawancara*, Maron Kidul, 12 Mei 2015

berpartisipasi dalam kegiatan, meningkatkan kesadaran warga untuk turut menjaga atau melestarikan hasil-hasil kegiatan, mengajak warga agar membayar pinjaman tepat waktu, dll.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ketua UPK bahwa:

“Spanduk biasanya kita taruk di kantor Desa di letakkan di tempat yang strategis agar bisa terlihat masyarakat kalangan bawah.”⁷⁷

b) Brosur

Brosur menjadi suatu alternatif media komunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan, brosur tersebut diberikan langsung kepada warga dan sumua kegiatan-kegiatan sudah tertera di dalam brosur agar masyarakat tahu akan agenda atau kegiatan PNPM di masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ketua UPK bahwa:

“Brosur di sebarakan kepada masyarakat pedesaan untuk mengetahui program PNPM, brosur ini disebarakan dan ditempel di kantor Desa melalui perangkat Desa”⁷⁸

b. Prosedur Penyaluran Dana PNPM Mandiri dalam Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat

Penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah aliran dana PNPM Mandiri perdesaan dari rekening kolektif di UPK ke desa melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan rencana kegiatan dan

⁷⁷ Sanawi, *Wawancara*, Maron Kidul, 09 Juni 2015S

⁷⁸ Sanawi, *Wawancara*, Maron Kidul, 09 Juni 2015

kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses penyaluran dana ini, kelompok masyarakat harus mengajukan proposal, maka desa berkewajiban membantu untuk pembuatan proposal yang nantinya akan mendapatkan pinjaman dana dari PNPM.

Menurut bendahara UPK-PNPM Mandiri Perdesaan:

“Pertama ya Desa harus bentuk kelompok, kita maksimal satu anggota 20 orang trus minimal 7 orang. ya pertama Desa ngajukan ke tim pembuat proposal di situ TPU mereka ngajukan kisarannya sekian-sekian, proposalnya jadi kita ceklis. kemudian kita lempar ke tim Verifikasi, nah tim ini nanti turunnya ke kelompok itu setiap anggota kisarannya kan tergantung usaha mereka kalau kita punya patokan pinjaman pertama paling besar antara 1- 1,5 itupun lihat usaha mereka paling kecil biasanya 500. Setelah ini diverifikasi dilempar lagi kekecamatan dari sini kita masih godok lagi nanti akhirnya larinya ke tim pendanaan, lah dari tim pendanaan ini biasanya mereka kan mengirimkan wakil 1 Desa itu 1 orang. Biasanya wakil ini mengetahui kelompok mana-mana saja yang oh ini kriterianya bagus, ini kurang bagus, atau gimana mereka yang menentukan kalau di sisni sudah di acc baru kita cairkan. Besarannya nggak harus sesuai dengan tim verifikasi bisa berkurang atau bisa nambah tergantung si ininya dia tahu nggak usaha per anggotanya ini. Misalnya ini punya warung besar gimana kalau ditambahkan orangnya gini-gini bisa jadi seperti itu”⁷⁹

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Anggota Kelompok timur pasar:

“Rp 1.000.000 pencairan pertama untuk gelombang kedua Rp 1.500.000, jadi pertahun naik Rp 500.000. tapi kalau ketua dan sekertaris besar yaitu Rp 2.000.000”⁸⁰

⁷⁹ Dyah Listyaning Wibowo, *Wawancara*, Maron Kidul, 15 Mei 2015

⁸⁰ Hamidah, *wawancara*, Maron Kidul, 22 Mei 2015

anggota simpan pinjam tidak akan mendapatkan pinjaman yang banyak melainkan pinjaman yang berangsur-angsur mulai dari Rp 1.500.000 sampai batas maksimal Rp 4.000.000.

PNPM Mandiri Perdesaan dalam menyalurkan dana Simpan Pinjam Perempuan kepada masyarakat ada 2 metode angsuran yaitu pertama metode dengan angsuran 12 bulan dan kedua metode dengan angsuran 10 bulan. anggota SPP berkewajiban melunasi angsuran tiap bulan dengan jasa atau bunga 1,5%.

Berikut pernyataan bendahara UPK-PNPM Mandiri Perdesaan:

“Kita kan punya 2 metode angsuran ada yang sebagian Desa itu yang ngambil 12 bulan ada juga yang 10 bulan tapi secara jasa kita tetep gitu. maksudnya, jasanya kita kan 1,5 ya meskipun 12 bulan atau 10 bulan ya tetep 1,5 itu jasanya. Cuma beda kisaran angsuran kalau yang 10 bulan biasanya kan lebih besar dari yang 12 bulan”.⁸¹

Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua kelompok timur pasar:

“Jika pinjamnya itu satu juta maka pembayaran tiap bulannya itu Rp 105.000”⁸²

Dari hasil wawancara diatas menerangkan bahwa ada dua bentuk angsuran, ada yang sepuluh bulan dan yang 12 bulan tergantung dari kesepakatan dari anggota SPP dan juga tergantung dari program.

c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program Simpan pinjam Perempuan yang ada di desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merupakan program

⁸¹ Dyah Listyaning Wibowo, *Wawancara*, Maron Kidul, 15 Mei 2015

⁸² Hamidah, *wawancara*, Maron Kidul, 22 Mei 2015

pemberdayaan masyarakat yaitu program mandiri yang membina, membantu dan mendidik Rumah Tangga Miskin Khususnya perempuan dalam peningkatan pendapatan Rumah Tangga Miskin serta mendorong pengurangan Rumah Tangga Miskin dan pencipta lapangan kerja. Pemberian ataupun pinjaman modal yang diberikan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan yang ada di desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo digunakan untuk membuka usaha baru ataupun tambahan modal untuk melanjutkan usaha yang akan dikembangkan. Dengan adanya tambahan modal ataupun pemberian modal sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Sebagian dari anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan mengakui hal tersebut, bahwasannya dengan adanya bantuan modal dari program Simpan Pinjam Perempuan, mereka bisa membantu meningkatkan pendapatan suami serta mengembangkan usahanya.

Pemaparan tersebut disampaikan oleh salah satu ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan:

“Membantu sekali ya, yang awalnya ndak punya kegiatan apa-apa, Cuma jagain anak, nyapu, melayani suami sekarang sudah punya usaha walaupun kecil-kecilan, jual pentol, jual sayur, peracangan dan ada juga yang nambah modal untuk usaha, itu jual sandal di pasar trus jualan sembako. La itu semua karna ada tambahan modal dari SPP, jadi ya sangat membantu.”⁸³

Pemaparan tersebut juga disampaikan oleh anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan.

⁸³ Mutammimah, *wawancara*, Maron Kidul, 22 Mei 2015

“ya sangat membantu ndok, awalnya dagangannya saya kecil ndok dan dengan adanya SPP ini saya bisa mengembangkan usahanya saya, contohnya saja yang kamu lihat ini ndok wes lumayan banyak kan barang dagangannya kan, ya alhamdulillah wes mapan ndok”.⁸⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota SPP lainnya:

“Alhamdulillah, sudah diberi pinjaman modal dari SPP, walaupun hasilnya tidak seberapa besar, ya namanya saya pinjam modal untuk usaha jual sayur. ya cukuplah buat makan, bisa menyekolahkan anak, bayar hutang. Yang penting bisa bantuin suami saya, tidak ngerepotin suami”.⁸⁵

Sebagaimana pernyataan dari beberapa pemanfaat Simpan Pinjam Perempuan bahwa Program Simpan Pinjam Perempuan yang ada di desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan Rumah Tangga Miskin.

Dengan adanya penyaluran dana program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, sudah banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo: anggota Simpan Pinjam Perempuan dapat membantu meningkatkan pendapatan suami, menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dan membuka lapangan pekerjaan.

⁸⁴ Siti aisyah, *Wawancara*, Maron Kidul. 28 Mei 2015

⁸⁵ Maryam, *Wawancara*, Maron Kidul 28 Mei 2015

3. Kendala penyaluran dana PNPM Mandiri dalam upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

PNPM adalah suatu program pedesaan untuk membantu masyarakat menjadi lebih baik. Terutama pada program Simpan Pinjam Perempuan, dimana program ini memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tujuan membantu atau meringankan beban masyarakat agar kehidupan kedepan menjadi lebih baik. Namun, dalam menjalankan programnya PNPM Mandiri tidak selalu berjalan dengan lancar. Karena, Beberapa anggota Simpan Pinjam Perempuan ada yang tidak melunasi tanggungan per bulannya dan ada juga yang berhenti menjadi anggota.

Adapun penuturan dari Bendahara UPK-PNPM Mandiri Perdesaan yaitu:

“kendalanya lebih ke pola pikir, kadang ada orang yang pintar misalkan 1 RT ada satu orang yang pengetahuannya lebih tinggi, biasanya orang tersebut yang sering ngakali atau istilahnya menyimpang, kalau anggota bayar biasanya dipake ketua kelompoknya. Kalau slama ini penyimpangan tersebut lebih kepengurus Simpan Pinjamnya yaitu lebih ke ketua. Jadi kendalanya lebih ke pola pikir”

Pemaparan tersebut juga disampaikan oleh Tim Verifikasi UPK-PNPM Mandiri Perdesaan

“kendala yang pertama memang inikan program dari pemerintah jadi ada orang yang memprofokatori. Begini ada orang pintar atau mampu memprofokatori. Jadi kalau ad orang yang mau membayar dia bilang kalau tidak usah bayar karena ini uang pemerintah. Yang kedua kendalanya tim verivikasi”

Kendala yang paling utama di PNPM Mandiri Perdesaan yang terjadi di Desa Maron Kidul Kecamatan maron adalah lebih pada pola pikir

anggota ataupun ketua anggota yang merasa bahwa dana atau pinjaman dari PNPM adalah dana pemerintah dan tidak wajib dikembalikan.

Menurut Ketua UPK-PNPM Mandiri Perdesaan:

“ya repot lw sudah ada yang nunggak, masalahnya PNPM ini kan Tidak ada Jaminan jadi ya sulit kalau sudah begitu. Kendalanya di PNPM itu tidak ada jaminan itu paling utama. Jadi orang-orang ini menganggap remeh”.

Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya PNPM Mandiri yang ada di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tidak menggunakan jaminan bagi setiap anggota yang melakukan pinjaman. Hal tersebut menyulitkan pihak PNPM dalam menyalurkan dana atau pinjaman kepada masyarakat.

4. Upaya Untuk Mengatasi Kendala PNPM Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

Lembaga keuangan seperti perbankan untuk menangani permasalahan kredit macet dilakukan dengan berbagai cara yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan. Tidak jauh berbeda pada program PNPM yaitu Simpan Pinjam khusus Perempuan ini juga dilakukan dengan upaya-upaya yang ada salah satunya yaitu dengan restrukturisasi atau perpanjangan waktu pinjaman misalnya dari bulanan menjadi triwulan. Setiap perpanjangan waktu kredit PNPM Mandiri tidak hanya berdiam diri di kantor dengan menunggu anggota SPP membayar tanggungan. Namun Tim Verifikasi akan memperingati anggota yang melakukan perpanjangan waktu dengan cara

menghubungi melalui telephone, ataupun mendatangi langsung kerumah. Karena banyak anggota yang seringkali melebihi jatuh tempo bahkan tidak membayar tanggungan.

Dalam menangani berbagai kendala-kendala yang terjadi di PNPM mandiri maka pihak PNPM mengambil langkah untuk mengantisipasi tanggungan yang melebihi jatuh tempo ataupun Anggota yang berhenti dan masih punya tanggungan.

Seperti yang di paparkan oleh ketua UPK-PNPM Mandiri perdesaan:

“Untuk mengatasi anggota yang nakal biasanya kita hanya menasehati dan menagih terus-menerus, apalagi ini kan nggak ada jaminan jadi repot, ya mau tidak mau harus terus-menerus di tagih. Misalnya di telvon atau di datangi kerumahnya begitu”

Menurut pernyataan dari Bendahara UPK-PNPM Mandiri Perdesaan:

“Selama ini kita nggak pernah ngasih denda ya, maksudnya kita hanya ngasih reward ke mereka yang memang tepat waktu dan tidak menyalahi jatuh tempo. tapi kalau denda kita secara ini aja ya kekeluargaan. jasa kita sedikit besar di banding dengan bank-bank di sekitar kita. kalau kita masih ngasih denda, ini kan kelompok ekonomi produktif tapi yang nggak mampu untuk pinjam ke bank. tapi secara mekanisme mereka kan mampu untuk pinjam, kalau kita ngasih beban lagi ke mereka semacam denda ini kan memberatkan. sanksi kita ya hanya kooperatif saja ya ini di tagih terus-menerus. Ya ditelusuri aja ini misalnya memang ada tunggakan, tunggakannya ini dari mana? Kalau memang dari si ketua ya berarti kan ada apa-apa di dalamnya itu kalau memang dari anggota ya kita datengin kerumahnya knapa? Dari situ baru kita kasih langkah ini bisa dicicil misalnya seperti itu setiap harinya, setiap minggunya yang penting dia mampu melunasinya”

⁸⁶

⁸⁶ Dyah Listyaning Wibowo, *Wawancara*, Maron Kidul, 18 Mei 2015

Pemaparan ini juga disampaikan oleh Ketua anggota SPP

Kelompok timur pasar:

“Saya sebagai ketua anggota SPP berkewajiban untuk menagih kekurangan uang pinjaman SPP yang belum lunas. Akan tetapi, kelompok saya alhamdulillah 2012-2014 mendapatkan Iuran Pembayaran Tepat Waktu (IPTW) sebesar Rp 280.000,- karena kelompok saya tepat waktu untuk membayar tangungannya. Namun, untuk tahun ini saya tidak mendapatkan IPTW karena dua bulan terakhir ini pembayarannya melebihi jatuh tempo maka IPTW nya di anggap hangus”⁸⁷

Sesuai hasil wawancara, bahwa setiap kelompok yang tidak membayar angsuran yang telah disepakati bersama, maka pihak UPK akan menagih terus-menerus pihak yang bersangkutan. namun apabila angsuran di bayar tepat waktu maka setiap kelompok yang membayar angsuran tepat waktu akan mendapatkan IPTW (Iuran Pembayaran Tepat Waktu).

Pemaparan ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Maron Kidul:

“Saya sebagai Kepala Desa berkewajiban memberikan teguran kepada para anggota SPP yang tidak tepat membayar angsuran pinjaman, apabila ketua anggota SPP sudah memperingati kepada anggotanya masih belum membayar iurannya, maka saya yang akan turun untuk memberikan penjelasan kepada anggota SPP untuk membayar iuran rutinya”⁸⁸.

C. Pembahasan Temuan

1. Program PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Program PNPM Mandiri perdesaan merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten

⁸⁷ Hamidah, *Wawancara*, Maron Kidul, 22 Mei 2015

⁸⁸ Untung, *Wawancara*, Maron Kidul, 05 Juni 2015

Probolinggo dimana ada beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu diantaranya:

a. Prasarana dan Sarana

Prasarana dan sarana yang ada di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten probolinggo digunakan untuk mendanai perbaikan jalan, MCK (Mandi, Cuci, Kakus), perbaikan jembatan, listrik, pompa air dll.

b. Bidang pelayanan pendidikan

Pelayanan pendidikan yang ada di desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo di tujukan kepada anak Rumah Tangga Miskin usia sekolah, SD/MI dan SMP/MTS, guru dan komite sekolah. Dalam bentuk Beasiswa, pelatihan keterampilan Masyarakat dan Pengembangan wawasan dan kepedulian.

c. Bidang pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dilaksanakan untuk membantu Rumah Tangga Miskin dan mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan sederhana, yaitu dengan berbagai jenis kegiatan. Diantaranya, penyuluhan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan kesehatan mandiri.

d. Simpan Pinjam Perempuan

Program Simpan Pinjam Perempuan yang dilaksanakan di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu program yang masih berlanjut. Dalam melaksanakan program Simpan Pinjam perempuan ditujukan kepada Rumah Tangga Miskin khusus warga perempuan.

Pada tanggal 4 Januari 2015 PNPM Mandiri sudah tidak lagi didanai oleh pemerintah (phase out). Maka untuk Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tetap melanjutkan programnya akan tetapi, program yang dilanjutkan oleh Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo hanya program SPP (Simpan Pinjam Perempuan).

2. Mekanisme penyaluran dana PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan masyarakat

Mekanisme penyaluran dana PNPM Mandiri yang ada di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yaitu dana dari kolektif UPK-PNPM Mandiri untuk program Simpan Pinjam Perempuan yang ditujukan kepada Rumah Tangga Miskin dengan membentuk kelompok dan mengajukan proposal.

Program SPP yang berada di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merupakan barometer yang akan mengajak atau membina masyarakat ke arah yang lebih baik dengan pendapatan yang tidak lagi pas-pasan. Selain itu, dari program SPP Desa Maron Kidul

Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dapat memberikan kontribusi yang positif dalam melakukan kewajiban dan peran untuk bertanggung jawab sebagai pemanfaat program SPP.

Disamping itu, proses penyaluran dana melalui Program SPP yang dikhususkan untuk warga perempuan juga melatih kedewasaan dan kemandirian. Dengan berbagai usaha masing-masing orang disetiap kelompok.

Pada umumnya Program-program yang dicanangkan oleh PNPM ini merupakan program yang dikhususkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM). Namun, pada kenyataannya tidak sedikit pemanfaat yang bukan dari anggota RTM dan malah sebaliknya.

3. Kendala penyaluran PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat

Program Simpan Pinjam Perempuan, memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tujuan membantu atau meringankan beban masyarakat agar kehidupan kedepan menjadi lebih baik. Namun, dalam menyalurkan modal untuk program Simpan Pinjam Perempuan tidak selalu berjalan dengan lancar. PNPM Mandiri perdesaan mengalami kendala yang sangat signifikan karena pada saat PNPM menyalurkan atau memberikan modal awal kepada setiap kelompok, PNPM Mandiri tidak memberikan syarat anggunan/jaminan sehingga pihak PNPM Mandiri kesulitan ketika salah satu kelompok Simpan Pinjam Perempuan tidak membayar kewajibannya.

4. Upaya untuk menghadapi kendala penyaluran dana PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam penyaluran dana PNPM Mandiri di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo memiliki kendala-kendala yang cukup signifikan. Namun bukan berarti penyaluran dana PNPM Mandiri tidak dapat dilaksanakan, hanya saja memerlukan solusi yang mampu meminimalisir kendala-kendala tersebut, diantaranya:

- a. Perpanjangan waktu, berupa pola angsuran dari bulanan menjadi triwulan.
- b. Menagih terus menerus melalui telephone atau mendatangi langsung kerumah.

Untuk tahun berikutnya pihak PNPM Mandiri yang ada di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo melakukan kerjasama dengan pihak kejaksaan. Agar kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang tidak membayar angsuran tiap bulannya merasa takut dengan surat panggilan yang di berikan oleh pihak kejaksaan.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilanjutkan dengan penyajian dan analisis data peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Program PNPM Mandiri upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program PNPM Mandiri perdesaan merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dimana ada beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu diantaranya: Prasarana dan Sarana, Bidang pelayanan pendidikan, Bidang pelayanan kesehatan, Simpan Pinjam Perempuan. Namun sejak tanggal 4 Januari 2015 PNPM Mandiri *Phase out* dan hanya menjalankan aset yang ada yaitu Simpan Pinjam Perempuan.

2. Mekanisme penyaluran dana PNPM upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Mekanisme penyaluran dana PNPM upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana Simpan Pinjam Perempuan diperuntukkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM). Simpan Pinjam Khusus Perempuan ini diberikan kepada setiap kelompok per desa. Kelompok maksimal terdiri dari 20 orang dan minimal terdiri dari 7 atau 5 orang. Setiap pengajuan proposal pertama biasanya PNPM hanya memberikan pinjaman

maksimal 1 juta dan minimal 500 Ribu. Namun apabila anggota sudah melebihi pinjaman 3 kali, Maka PNPM bisa memberikan pinjaman lebih dari 1 juta dan masimal pinjaman 5 juta dengan jasa 1,5%.

3. Kendala penyaluran dana PNPM Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat

Kendala dalam penyaluran dana PNPM lebih kepada pola pikir anggota ataupun ketua kelompok yang beranggapan bahwa dana yang diberikan kepada masyarakat adalah dana pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Selain dari pola pikir anggota ataupun ketua kelompok kendala yang paling urgen adalah tidak adanya jaminan bagi peminjam modal sehingga pihak PNPM kesulitan ketika dari anggota Simpan Pinjam Perempuan tidak membayar tanggungan.

4. Upaya mengatasi kendala-kendala penyaluran dana PNPM Mandiri untuk memberdayakan ekonomi masyarakat

Untuk mengatasi kendala penyaluran dana yang ada pihak PNPM Mandiri Perdesaan melakukan dengan upaya-upaya yang ada salah satunya yaitu dengan restrukturisasi atau perpanjangan waktu pinjaman misalnya dari bulanan menjadi triwulan. Dan hanya memperingati secara terus-menerus para anggota SPP yang melebihi jatuh tempo namun apabila masih tidak membayar tanggungan maka pihak PNPM bekerja sama dengan kepala desa dan memberikan ancaman agar setiap anggota yang nakal jerah. Bahkan untuk tindak lanjutnya pihak PNPM Mandiri melakukan kerjasama dengan kejaksaan.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran dari peneliti sebagai pengamat dalam hal ini, diantaranya:

1. Kepada pihak PNPM Mandiri, dalam mengatasi permasalahan ataupun kedala penyaluran dana PNPM Mandiri, PNPM memberikan jangka waktu kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan untuk melunasi tanggungannya. Dan memberikan jaminan agar kelompok Simpan Pinjam Perempuan membayar tepat waktu.
2. Bagi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diharapkan dapat membayar angsuran tepat waktu. Pembayaran angsuran tepat waktu akan memberikan keringanan kepada setiap anggota yaitu setiap anggota bisa mendapatkan reward ataupun hadiah dari PNPM. Dan benar-benar menggunakan uang tersebut sebagai modal untuk melakukan usaha ataupun kerjasama antara sesama anggota dan dapat mensejahterakan para anggota.

IAIN JEMBER

**SISTEM PENYALURAN DANA PNPM MANDIRI
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DI DESA MARON KIDUL KECAMATAN MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Ekonomi Islam (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Mu'amalah



Oleh:

DINI LUTFIAH BERLIAN

NIM : 083 112 023

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
AGUSTUS 2015**

**SISTEM PENYALURAN DANA PNPM MANDIRI
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DI DESA MARON KIDUL KECAMATAN MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Ekonomi Islam (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah

Oleh:

Dini Lutfiah Berlian

NIM : 083 112 023

Disetujui Oleh:
Pembimbing

IAIN JEMBER

Moch. Chotib, MM

NIP. 19710727 200212 1 003

**SISTEM PENYALURAN DANA PNPM MANDIRI
DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DI DESA MARON KIDUL KECAMATAN MARON
KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Ekonomi Islam (S.Sy)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Muamalah

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 September 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Mahmudah, S.Ag, ME. I
NIP. 19750702 199803 2 002

Toton Fanshurna, M.EI
NIP. 19811224 201101 1 008

Anggota

1. **Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag** ()

2. **Moch. Chotib, MM** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS, M. HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(QS. Al-Maidah:2)¹

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *ALHIDAYAH Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: KALIM,2011),107.

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya.....

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam yang selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. Bapak dan ibu (Yusuf dan Sujannah) sebagai tanda bakti, hormat dan terimakasih yang tiada terhingga.

Terimakasih bapak dan ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik.

Untuk kakak dan adik-adikku (Atika Dian M, Lisa Wardatul I dan Nurul Hidayah) terima kasih atas doa dan bantuan kalian semua.

Untuk pendamping hidupku (fathuel Mut'im) terimakasih telah menyemangati, membantuku serta mendoakanku hingga tugas akhir ini terselesaikan.

Buat sahabatku dan teman-teman MU C terima kasih atas bantuan doa, nasehat, jiburan traktiran dan semangat yang kamu berikan selama aku kuliah, aku tak akan melupakan yang telah kau berikan selama ini.

Buat teman-teman kontrakan D'ajoeng Mbak Fitri, Ma'e Ifa, Mak Rinda, Anis, Dek Dwi, Dek Ika, Dek Nyun, Dek Yu;a, dan Dek Unis. Terima kasih atas semangat kalian dan candaan kalian. Semoga keakraban ini selalu terjalin diantara kita.

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Dini Lutfiah Berlian, 2015: *Sistem Penyaluran Dana PNPM Mandiri Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.*

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang didunia ini. Program PNPM Mandiri yang ada di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merupakan Program dari pemerintah sejak tahun 2008 dan semenjak tahun 2015 PNPM Mandiri *Phase Out*. Berbeda dengan PNPM Mandiri yang ada di Desa-desa lainnya PNPM Mandiri di Desa maron kidul adalah salah satu yang masih menjalankan kegiatannya walaupun tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Apa saja program PNPM Mandiri upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo ?; 2) Bagaimana mekanisme penyaluran dana PNPM Mandiri upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo?: 3) Apa saja kendala penyaluran dana yang di hadapi PNPM Upaya pemberdayan ekonomi Masyarakat di desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten probolinggo?; 4) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghadapi Kendala penyaluran dana PNPM Mandiri upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten probolinggo?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja program PNPM, Untuk mendeskripsikan mekanisme penyaluran dana PNPM Mandiri, Untuk mendeskripsikan kendala penyaluran dana PNPM Mandiri, Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala penyaluran dana PNPM Mandiri.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, menganalisis sistem penyaluran dana di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan tehnik *purposive sampling* dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: (1) program PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo hanya Simpan Pinjam Perempuan (2) sistem Penyaluran dana PNPM Mandiri yang ada di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merupakan dana dari rekening kolektif di UPK ke Desa melalui Tim Pengelola Kegiatan dengan mengajukan Proposal (3) kendala penyaluran dana PNPM mandiri perdesaan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu lebih kepolafikir masyarakat dan tidak adanya jaminan sehingga pihak UPK-PNPM merasa kesulitan dalam menangani hal tersebut (4) upaya menangani kendala penyaluran dana PNPM untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu perpanjangan waktu kredit dan perpanjangan waktu angsuran dengan menagih terus menerus melalui telepon ataupun mendatangi langsung kerumahnya.

KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Muhammad SAW yang telah memberikan risalah kepada umatnya dan berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga mampu mengajak umat manusia beranjak dari ke-*jahiliyah*-an menuju umat yang berpendidikan dan berakhlak.

Kesuksesan dari penyusunan skripsi ini penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.EI selaku Ketua Jurusan Muamalah IAIN Jember.
4. Bapak Moch. Chotib, MM selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan IAIN Jember, yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi syariah yang tak ternilai harganya. Kerelaan para dosen adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
6. Seluruh jajaran Pengurus UPK-PNPM MPd Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
7. Civitas Akademika IAIN Jember

Penulis juga menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat dan barakah bagi penulis sekaligus pembaca. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT, Amiin.

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44

B. Lokasi Penelitian	45
C. Subyek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	50
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	55
B. Penyajian Data dan Analisis.....	66
C. Pembahasan Temuan.....	81
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Jurnal Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Foto-foto atau Dokumentasi	
5. Gambar atau Denah	
6. Surat Keterangan	
7. Surat keterangan selesai penelitian	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
4.1	Alokasi Bantuan Langsung	57
4.2	Dana DOK.....	57
4.3	Pengurus BKAD	60
4.4	BP-UPK	60
4.5	Pengurus UPK.....	61
4.6	Tim Verifikasi	61
4.7	Jumlah Penduduk Menurut Pencaharian.....	68



DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Qurratu Ainil. 2011. *Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pnpm Mandiri Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember*. Skripsi. Jember: STAIN Jember.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2011. *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Tangerang: PT Kalim.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. *Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*.
- Indrajit, Wisnu dan Soimin. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan; Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Malang: Intrans Publishing.
- Kasmir. 2008. *manajemen perbankan*. Jakarta: Rajawali.
- Mahmudah. 2013. *Ayat-ayat Ekonomi*. Jember: STAIN Jember Press.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nawawi, Imam. 1985. *Hadits Arba'in Annawawiyah*, terj. Abdul Muhaimin As'ad Surabaya: Bintang Terang.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis Swot*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rukminto Adi, Isbandi. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.
- STAIN. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan lembaga keuangan diskripsi dan ilustrasi* Yogyakarta: Ekonesia.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.

Supranto. 2003. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Redaksi. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Tony Nasdian, Fredian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wahidah, Anisatul. 2010. *Persepsi Tokoh Masyarakat Islam Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Studi Kasus Tahun 2009 di Desa Kaligung Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi.Jember: STAIN Jember.

Wargadinata, Wildana. 2011. *Islam & Pengentasan Kemiskinan*. Malang: UIN Maliki Press.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik*. Jakarta: kencana.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan tanggal akses 16 april 2015

<http://cintailmupengetahuan.blogspot.com/2011/04/pemberdayaan-ekonomi.html?m=1> tanggal akses 16 april 2015

<http://syukronassyakur.blogspot.com/2013/08/pengertian-pemberdayaan-masyarakat.html?m=1> tanggal akses 21 April 2015

<http://informasi.com/pengertian-sistem-menurut-para-ahli/> tanggal akses

2 juli 2015

Lampiran 1

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Sistem Penyaluran Dana PNPM Mandiri Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo	Sistem Penyaluran dana PNPM upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program PNPM 2. Mekanisme penyaluran dana PNPM 3. Kendala penyaluran dana PNPM 4. Upaya untuk menangani kendala penyaluran dana PNPM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Prasarana 2. Bidang Layanan Pendidikan 3. Bidang Layanan Kesehatan 4. Simpan Pinjam Perempuan <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Penyaluran Dana 2. Prosedur Penyaluran Dana 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit macet (Pinjaman Bermasalah) 2. Penggolongan permasalahan <ol style="list-style-type: none"> 1. perpanjangan waktu kredit 2. perpanjangan waktu angsuran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan. <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua UPK PNPM b. Bendahara UPK PNPM c. Ketua Kelompok d. Anggota Kelompok 2. Documenter 3. Kepustakaan <ul style="list-style-type: none"> • Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Al-qura'an b. Al-hadits c. Buku pokok • Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Kamus b. Web site 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan : Kualitatif Deskriptif 2. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview c. Dokumenter 3. Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan 4. Keabsahan Data: Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja program PNPM Mandiri dalam Upaya pemberdayaan Masyarakat? 2. Bagaimana system penyaluran dana PNPM dalam upaya pemberdayaan masyarakat? 3. Apa saja kendala penyaluran dana PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan masyarakat? 4. Bagaimana Upaya menangani kendala penyaluran dana PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan masyarakat?